

Di Kecamatan Cicendo Kota Bandung” dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang bencana alam gempa bumi serta upaya yang harus dilakukan. Kegiatan seperti ini membuat anak lebih cepat menerima materi yang diberikan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMP IT Thoriqul Jannah kejadian gempa terakhir terjadi pada bulan februari 2023 dan tidak ada korban jiwa serta tidak ada kerusakan bangunan. Sekolah ini berada di tengah-tengah perumahan dan lingkungan persawahan. Selain itu, siswa belum pernah diberikan informasi terkait dengan kebencanaan dari pihak sekolah maupun puskesmas ataupun instansi lain nya. Maka dari itu penulis tertarik melakukan pendidikan kesehatan menggunakan metode *school watching* dalam upaya tanggap darurat bencana alam gempa bumi di SMP IT Thoriqul Jannah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah metode *school watching* dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam upaya tanggap darurat bencana alam gempa bumi?
2. Apakah metode *school watching* dapat membantu perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan pada siswa sekolah menengah pertama?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan yang komprehensif terhadap siswa sekolah menengah pertama di SMP IT Thoriqul Jannah.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Melakukan pengkajian pada siswa SMP IT Thoriqul Jannah tentang pengetahuan dan upaya dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi di sekolah
2. Menetapkan diagnosa keperawatan pada siswa SMP IT Thoriqul Jannah dalam upaya tanggap darurat bencana alam gempa bumi di sekolah.
3. Merumuskan dan menetapkan intervensi keperawatan pendidikan kesehatan menggunakan metode *school watching* dalam upaya tanggap darurat bencana alam gempa bumi yang diberikan pada siswa SMP IT Thoriqul Jannah.
4. Melakukan implementasi tindakan keperawatan pendidikan kesehatan dengan metode *school watching* dalam upaya tanggap darurat bencana alam gempa bumi pada siswa di SMP IT Thoriqul Jannah.
5. Melakukan evaluasi terhadap implementasi pendidikan kesehatan dengan metode *school watching* dalam upaya tanggap darurat bencana alam gempa bumi pada siswa di SMP IT Thoriqul Jannah.

6. Melakukan analisa kasus siswa SMP IT Thoriqul Jannah dalam upaya tanggap darurat bencana alam gempa bumi menggunakan metode *school watching*.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritik

Karya Ilmiah ini dapat memberikan informasi terkait hasil karya ilmiah tentang pendidikan kesehatan menggunakan metode *school watching* dalam upaya tanggap darurat bencana alam gempa bumi pada siswa SMP sehingga dapat memperluas keilmuan profesi keperawatan.

1.4.2. Manfaat Praktik

1. Bagi Sekolah

Karya ilmiah ini dapat diterapkan sebagai program sekolah dalam upaya tanggap darurat bencana alam gempa bumi.

2. Bagi Siswa

Dapat menerapkan upaya tanggap darurat bencana alam saat gempa bumi terjadi.

3. Bagi Penulis

Meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan analisa pendidikan kesehatan dengan metode *school watching* dalam upaya tanggap darurat bencana alam gempa bumi serta menambah pengetahuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah akhir ners.

1.5. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan ini membahas tentang pendidikan kesehatan dengan metode *school watching* dalam upaya tanggap darurat bencana alam gempa bumi pada siswa di SMP IT Thoriqul Jannah. Penulisan ini menggunakan metode studi kasus. Penulisan ini menggunakan sumber data berdasarkan temuan penulis dari lapangan dan temuan jurnal-jurnal ilmiah dengan tema pendidikan kesehatan metode *school watching* dalam upaya tanggap darurat bencana alam gempa bumi pada siswa. Data penulisan didapatkan dari hasil studi pendahuluan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Berdasarkan dari hasil beberapa penelitian didapatkan bahwa metode *school watching* berpengaruh terhadap tingkat kesiapsiagaan dan pengetahuan siswa. Dibuktikan dengan hasil penelitian (Meilianingsih & Sugiyanto, 2022) yang berjudul “Pengaruh Metode *School Watching* Terhadap Kesiapsiagaan Siswa Sd Dalam Menghadapi Bencana Di Kecamatan Cicendo Kota Bandung” didapatkan bahwa metode *school watching* membantu peserta didik dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui kegiatan yang dilakukan di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Intervensi diberikan dalam 5 kalipertemuan. Kegiatan intervensi meliputi: pemberian materi tentang kebencanaan, pengamatan, pemetaan, diskusi dan presentasi.

2.2 Konsep Bencana

2.2.1. Definisi Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan dampak psikologis (Kartika, 2021).

Bencana adalah suatu kejadian, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan

kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya (Saputra, Asman, 2023).

2.2.2. Jenis-Jenis Bencana

Beragam bencana pernah terjadi di Indonesia, berikut jenis-jenis bencana di Indonesia dapat disimpulkan secara implisit melalui UU No. 24 Tahun 2007, yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
2. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh perbuatan manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.

2.2.3. Siklus Bencana

Ada berbagai tahapan dalam bencana, yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Bencana yang terjadi dengan cepat memiliki fase-fase berikut (Sedia Simbolon dkk, 2023) :

2. Fase pencegahan

Semua tindakan yang bertujuan untuk mencegah bahaya manusia, terutama dari potensi bencana yang disebabkan oleh alam atau

buatan manusia (baik fisik maupun biologis). Namun, tidak semua bencana dapat dicegah tetapi masih dapat dibatasi atau dikurangi.

3. Fase mitigasi terhadap kerusakan

Semua prosedur yang dilakukan sebelum terjadinya bencana, serta persiapan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat ancaman.

3. Fase kesiapsiagaan

Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kerusakan, kematian, dan pengorganisasian yang diharapkan operasi transportasi untuk individu dari posisi terancam ke posisi lain.

4. Fase tanggap

Tindakan langsung saat terjadinya bencana mencakup melakukan penyelamatan, mencari korban selamat dan memenuhi kebutuhan dasar korban bencana.

5. Fase pemulihan

Terdiri dari dua fase rekonstruksi dan rehabilitasi

- a. Fase rehabilitasi - Tindakan untuk mengembalikan populasi ke keadaan sebelum bencana secara fisik maupun mental.
- b. Fase rekonstruksi Prosedur untuk mengembalikan kondisi konstruksi bangunan seperti pemukiman dan fasilitas lain yang mengembalikan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti sebelumnya atau menjadi lebih baik.

Setelah fase pemulihan selesai, langkah-langkah harus diambil untuk pembangunan berkelanjutan termasuk fase peringatan dini. Peringatan dini adalah strategi penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerusakan.

2.2. Pengurangan Resiko Bencana Pada Kelompok Rentan

Populasi kelompok rentan di Indonesia yang terdiri dari bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui dan lansia menurut data profil kesehatan Indonesia digambarkan pada tabel. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kelompok rentan terbesar di Indonesia adalah anak-anak dan di urutan kedua adalah lansia. Anak-anak merupakan segmen terbesar dari populasi negara berkembang dan seringkali menjadi korban pertama pada saat bencana

2.2.1. Karakteristik Kelompok Rentan

Kelompok rentan dikatakan rentan karena Kelompok rentan dikatakan rentan karena memiliki keterbatasan dan kebutuhan khusus sehingga berisiko tinggi terhadap bencana atau ancaman bencana. Kelompok rentan membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus supaya bisa bertahan menghadapi situasi pascabencana, karena kelompok ini merupakan kelompok yang paling besar menanggung dampak bencana. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 55 menyebutkan bahwa yang termasuk kedalam kelompok rentan adalah bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang

cacat dan orang lanjut usia. Kelompok rentan antara lain (Siregar & Wibowo, 2019):

1. Anak-Anak

Anak memiliki karakteristik yang membedakannya dengan orang dewasa yakni: usia, harapan, kebutuhan, pendidikan, ketrampilan, pengalaman hidup, tekanan sosial yang berbeda, kerentanan, peluang dipekerjakan, tanggung jawab, masalah kesehatan, hak dan perlindungan hukum, otoritas dalam membuat keputusan, kemampuan untuk melindungi diri, risiko kecelakaan, kemampuan fisik yang berbeda, pengelolaan emosi, kebutuhan akan cinta dan perhatian, risiko terhadap kurang gizi dan berisiko terhadap tindak kekerasan.

Pada kondisi bencana anak-anak dengan karakteristiknya menjadi rentan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Anak-anak seringkali menjadi korban terbesar dalam setiap kejadian bencana karena ketidakmampuannya melindungi diri dan berada diluar jangkauan pengawasan orangtuanya.

2. Perempuan

Perempuan menjadi bagian dari kelompok rentan karena memerlukan pemulihan yang lebih lama dan menghadapi masa yang lebih sulit pascabencana dari pada laki-laki. Stress yang meningkat pada masa bencana menjadi penyebab gangguan kehamilan, melahirkan, dan produksi ASI pada masa bencana. Hal ini jelas berdampak pada janin, bayi, ataupun anak yang sedang diasuh ibu.

Perempuan memiliki kerentanan yang tinggi bukan hanya pada ibu hamil dan menyusui saja, namun setiap perempuan selalu menjadi lebih dirugikan dan lebih merasakan dampak dari bencana dibandingkan lelaki. Dampak langsung dari bencana dapat dilihat dari kecenderungan wanita umumnya paling banyak menjadi korban yang butuh perawatan di fasilitas kesehatan, jumlah korban meninggal akibat bencana juga lebih banyak perempuan, menjadi cacat akibat terluka.

3. Penyandang Cacat/Disabilitas

Penyandang cacat menurut Undang-undang No.4 Tahun 1997 adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Jenis kecacatan terdiri dari Tunanetra (buta), Tunarungu (Tuli), Tuna Wicara (Bisu), Cacat anggota gerak, Lumpuh, Cacat Mental.

4. Lanjut Usia (Lansia)

Sebagian besar dari kelompok lanjut usia tidak dapat hidup secara mandiri karena keterbatasan mobilitas, lemah atau masalah kesehatan fisik dan mental sehingga membutuhkan pelayanan dan perlindungan khusus (Wibowo, 2018). Lansia mengalami penurunan sistem tubuh yang meliputi perubahan fisik, mental dan psikososial. Perubahan mental dipengaruhi oleh perubahan fisik, kesehatan umum, tingkat

pendidikan, keturunan, lingkungan, tingkat kecerdasan dan kenangan. Perubahan psikososial umumnya timbul karena lansia dianggap sudah tidak produktif lagi sehingga sebagian besar pensiun dari pekerjaannya (Wibowo, 2014). Lansia seringkali tinggal sendiri sehingga semakin memperbesar risiko lansia terdampak bencana, karena keterbatasan fisiknya dan tidak adanya bantuan dari anggota keluarga. Pada saat terjadi bencana yang mengharuskan lansia mengungsi akan menimbulkan perasaan tidak nyaman pada lansia karena merasa kehilangan tempat tinggalnya dan komunitasnya sama saja seperti kehilangan dirinya

2.2.2. Intervensi Pada Kelompok Rentan

Intervensi kelompok rentan adalah sebagai berikut (Siregar & Wibowo, 2019):

1. Partisipasi Anak-anak dalam Pengurangan Risiko Bencana

Partisipasi anak merupakan hak yang seringkali tidak mendapatkan dukungan dibandingkan tiga hak lainnya, padahal anak-anak dapat diberdayakan sebagai penyampai informasi ditengah-tengah masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa melibatkan anak dalam pengurangan risiko bencana dapat mengurangi dampak bencana dan juga meningkatkan ketahanan masyarakat. Selama ini anak-anak dianggap sebagai korban yang tidak berdaya pada saat terjadi bencana.

Keterlibatan anak-anak dalam pengurangan risiko bencana akan menjamin keselamatan mereka. Anak-anak sebagai kelompok yang

paling rentan perlu didorong dan dimotivasi untuk menciptakan dunia sebagai tempat yang aman untuk hidup. Anak-anak merupakan agen pembaharuan yang membawa perubahan jika mereka dilibatkan. Mereka bisa memaksimalkan adaptasi kapasitas yang dibutuhkan terhadap risiko bencana. Ketika anak-anak dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan anak-anak dapat menjadi penyampai informasi.

Pendidikan bencana telah menjadi prioritas komitmen global dalam upaya pengurangan risiko bencana yang dituangkan dalam kerangka kerja Sendai. Upaya membekali anak-anak dengan pengetahuan dan ketrampilan terhadap pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan mengintegrasikannya kedalam kurikulum pendidikan. Pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah dapat meningkatkan kedua hak anak untuk selamat dan turut berpartisipasi.

2. Penguatan Peran Perempuan dalam Mitigasi Bencana

Pengurangan risiko bencana pada perempuan dapat diupayakan dengan melibatkan peran perempuan dalam strategi pengurangan risiko bencana, hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan (Hastuti, 2016):

- a. Kesadaran perempuan dalam memahami situasi lingkungan dan ancaman bahaya
- b. Pemahaman tentang kerentanan dan kemampuan untuk mengukur kapasitas yang dimiliki perempuan.

- c. Kemampuan untuk menilai risiko yang dihati perempuan sebagai individu, anggota keluarga dan masyarakat.
- d. Kemampuan untuk merencanakan dan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko yang dimiliki baik melalui peningkatan kapasitas dan mengurangi kerentanan.
- e. Kemampuan perempuan untuk memantau, mengevaluasi dan menjamin keberlangsungan upaya pengurangan risiko sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dicegah.

Peran perempuan dalam mitigasi bencana seharusnya ditingkatkan sehingga dapat menekan terjadinya kerentanan yang ditimbulkan akibat dari bencana seperti kelaparan, keterbatasan akses, kehilangan tempat tinggal, masalah kesehatan (Hastuti, 2016).

2 Pengurangan Risiko Bencana terhadap Penyandang Cacat

Sebuah tantangan terhadap disabilitas dalam pengurangan risiko bencana bersumber dari persepsi masyarakat terkait disabilitas, hal tersebut didefinisikan dan diimplikasikan terkait dengan pengertian kebijakan pengurangan risiko bencana dan penyelenggaraannya. Disabilitas seringkali dikaitkan dengan istilah “kelompok rentan” atau “kebutuhan khusus” dan membutuhkan perhatian khusus/pertolongan. Seringkali penyandang disabilitas dianggap tidak ada dan kebutuhan mereka diabaikan oleh pendekatan pengurangan risiko bencana yang bersifat *top-down*.

Upaya pengurangan risiko bencana seringkali didesain untuk orang yang mampu berjalan, berlari, melihat, mendengar,

mengarahkan, memiliki pemahaman dan respon yang cepat terhadap arahan dan tanda bahaya. Orang yang tuli atau memiliki gangguan penglihatan kemungkinan tidak akan mendengar himbauan evakuasi atau melihat lampu tanda bahaya. Kerentanan disabilitas dapat dikurangi dengan melihat keberadaan mereka serta melibatkan mereka kedalam pembuatan keputusan. Melibatkan orang dengan disabilitas dalam rencana pengurangan risiko bencana dapat menciptakan strategi pengurangan risiko yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas.

3 Memberdayakan Lansia dalam Pengurangan Risiko Bencana

Melibatkan lansia dalam kegiatan sosial dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan keadaan menjadi lebih baik diantara kelompok rentan yang kehilangan rumah, komunitas dan harta bendanya. Sudah saatnya lansia dipandang sebagai kelompok masyarakat yang dapat diberdayakan saat bencana bukan hanya sebagai korban yang membutuhkan perhatian khusus. Lansia dapat berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana baik risiko yang ada dalam dirinya maupun sekelilingnya dengan melibatkan mereka sebagai relawan yang memberi support kepada sesama korban bencana. (Yotsui *et al*, 2015).

2.3. Konsep Dasar Kesiapsiagaan

2.3.1. Definisi Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (BNPB, 2017).

Kesiapsiagaan berarti merencanakan tindakan untuk merespons jika terjadi bencana. Kesiapsiagaan juga didefinisikan sebagai suatu keadaan siap siaga dalam menghadapi krisis, bencana atau keadaan darurat lainnya (Istihora, 2020).

2.3.2. Tujuan Kesiapsiagaan

Tujuan utama kesiapsiagaan adalah mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi. Sedangkan beberapa tujuan kesiapsiagaan bencana lainnya antara lain (Wignyo Adiyono, 2018):

1. Penanganan ancaman lebih cepat dan tepat
2. Penanganan kerentanan lebih cepat dan tepat
3. Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan bencana yang akan terjadi
4. Penambahan kerja sama antara pihak yang dapat mendukung dalam pengelolaan pasca bencana
5. Meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana.

2.3.3. Parameter Untuk Mengukur Kesiapsiagaan

2.3.3.1. Parameter Kesiapsiagaan Masyarakat

Menurut (LIPI – UNESCO/ISDR, 2006) ada lima parameter yang digunakan dalam mengkaji tingkat kesiapsiagaan

masyarakat dalam kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana yaitu:

1. Pengetahuan tentang risiko bencana yang dimiliki oleh masyarakat akan memengaruhi sikap dan kepedulian untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana, terutama penduduk yang tinggal di daerah pesisir yang rentan terhadap gempa dan tsunami.
2. Kebijakan dan panduan merupakan upaya konkret untuk melaksanakan kegiatan siaga bencana. Kebijakan dan panduan yang berpengaruh terhadap kesiapsiagaan meliputi pendidikan publik, emergency planning, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya, termasuk pendanaan, organisasi pengelola, SDM dan fasilitas-fasilitas penting untuk kondisi darurat bencana. Kebijakan dapat dituangkan dalam berbagai bentuk, tetapi lebih konkret apabila berbentuk peraturan, seperti SK dan Perda.
3. Rencana tanggap darurat terkait dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan. Berbagai tindakan tanggap darurat sangat penting untuk meminimalkan jatuhnya korban, terutama pada saat terjadi bencana dari hari pertama sampai hari ketiga sebelum bantuan datang.
4. Parameter peringatan bencana yang meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana

tidak kalah pentingnya dengan parameter lainnya. Adanya peringatan dini dapat mengurangi korban jiwa, harta benda, dan kerusakan lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan latihan dan simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, ke mana dan bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu sesuai dengan lokasi di mana masyarakat sedang berada saat terjadi bencana.

5. Parameter mobilisasi sumber daya baik sumber daya manusia (SDM), pendanaan, dan prasarana-sarana penting untuk keadaan darurat merupakan potensi yang dapat mendukung kesiapsiagaan. Namun sebaliknya, mobilisasi sumber daya juga dapat menjadi kendala apabila mobilisasi tidak dapat berjalan dengan baik.

2.3.3.2. Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah

Menurut (LIPI – UNESCO/ISDR, 2006) Kajian kesiapsiagaan komunitas sekolah didasarkan atas lima parameter, yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang gempa dan tsunami serta risiko bencana mencakup pengertian bencana alam, kejadian yang menimbulkan bencana, penyebab gempa, ciri-ciri gempa kuat dan bangunan tahan gempa serta tindakan yang dilakukan apabila terjadi gempa. Sedangkan pengetahuan tentang tsunami mencakup penyebab dan tanda-tanda terjadinya tsunami,

bangunan tahan tsunami dan tindakan yang dilakukan ketika air laut tiba-tiba surut.

- 2) Kebijakan dan panduan meliputi kebijakan pendidikan yang terkait dengan kesiapsiagaan komunitas sekolah, UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Surat Edaran 70a/MPN/2010), peraturan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Gugus Siaga Bencana di sekolah, dan kebijakan sekolah tentang pengintegrasian materi kesiapsiagaan dalam mata pelajaran yang relevan atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah serta mobilisasi sumber daya di sekolah untuk peningkatan kesiapsiagaan komunitas sekolah.
- 3) Rencana tanggap darurat terkait dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan. Rencana yang berkaitan dengan evakuasi mencakup tempat-tempat evakuasi, peta dan jalur evakuasi, peralatan dan perlengkapan, latihan/simulasi dan prosedur tetap (protap) evakuasi. Penyelamatan dokumen-dokumen penting sekolah juga perlu dilakukan, seperti copy atau salinan dokumen perlu disimpan di tempat yang aman.
- 4) Parameter peringatan bencana yang meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Peringatan dini bertujuan untuk mengurangi korban jiwa, karena itu

pengetahuan tentang tanda/bunyi peringatan, pembatalan dan kondisi aman dari bencana sangat diperlukan. Penyiapan peralatan dan perlengkapan untuk mengetahui peringatan sangat diperlukan, demikian juga dengan latihan dan simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, ke mana dan bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu sesuai dengan lokasi di mana masyarakat sedang berada saat terjadi bencana.

- 5) Parameter mobilisasi sumber daya adalah kemampuan sekolah dalam memobilisasi sumber daya manusia (SDM) guru dan siswa, pendanaan, dan prasarana-sarana penting untuk keadaan darurat. Mobilisasi sumber daya ini sangat diperlukan untuk mendukung kesiapsiagaan. Mobilisasi SDM berupa peningkatan kesiapsiagaan guru dan siswa yang diperoleh melalui berbagai pelatihan, workshop atau ceramah serta penyediaan materi-materi kesiapsiagaan di sekolah yang dapat diakses oleh semua komponen komunitas sekolah. Penyiapan dan peningkatan kemampuan gugus siaga bencana juga sangat diperlukan, termasuk kelompok peringatan bencana, kelompok pertolongan pertama, kelompok evakuasi dan penyelamatan serta kelompok logistik yang dibutuhkan oleh komunitas sekolah.

2.3.4. *Stakeholder* Utama Kesiapsiagaan

Ada tiga stakeholder utama yang berperan dalam kesiapsiagaan, yaitu (Hidayati, 2016):

1. Individu dan rumah tangga

Stakeholder individu dan rumah tangga dikatakan sebagai ujung tombak, subjek dan objek dari kesiapsiagaan karena berpengaruh secara langsung terhadap risiko bencana.

2. Pemerintah

Pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting terutama dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan bencana, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana publik untuk keadaan darurat.

3. Komunitas sekolah

Komunitas sekolah memiliki potensi yang besar dalam penyebarluasan pengetahuan tentang bencana, sumber pengetahuan dan petunjuk praktis apa yang harus disiapkan sebelum terjadinya bencana dan apa yang harus dilakukan saat serta setelah terjadinya bencana.

2.3.5. Peran Siswa Dalam Kesiapsiagaan Bencana

Siswa merupakan bagian dari komunitas sekolah memiliki peran yang besar dalam peningkatan kesiapsiagaan di lingkungan sekolah. Kesiapsiagaan pengurangan resiko bencana sangat diperlukan untuk menghadapi bencana. Siswa memiliki peran penting dalam penye-

barluasan pengetahuan tentang kebencanaan. Melalui pemberian pendidikan terkait bencana pada siswa akan membentuk karakter dan sikap kesiapsiagaan yang lebih tinggi dalam menghadapi bencana serta diharapkan pula sikap siaga bencana tersebut dapat disebarluaskan kepada orang terdekat dan masyarakat (Adhania Andika, 2022).

2.4. Media Pendidikan Kesehatan Dalam Upaya Tanggap Darurat

2.4.1 Definisi Pendidikan Kesehatan

Pendidikan kesehatan merupakan suatu proses pembelajaran yang terencana dan bersifat dinamis. Tujuan dari proses pembelajaran ini adalah untuk memodifikasi perilaku melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, maupun perubahan sikap yang berkaitan dengan perbaikan pola hidup ke arah yang lebih sehat. Perubahan yang diharapkan dalam pendidikan kesehatan dapat diaplikasikan pada skala individu hingga masyarakat, serta pada penerapan program kesehatan. Proses pembelajaran pada konsep pendidikan kesehatan ini dapat dipraktikkan oleh siapa pun, di mana pun, dan kapan pun (Nurmala, 2018).

2.4.2 Pengurangan Risiko Bencana

Pengurangan risiko bencana merupakan upaya meminimalisasi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Pada anak-anak sekolah dasar program PRB yang disusun sedemikian rupa bertujuan untuk (BNPB, 2016):